



**BPP
MHKP**

2024 LAPORAN KINERJA

BPPMHKP YOGYAKARTA

Kementerian Kelautan
dan Perikanan



    **BPPMHKP Yogyakarta**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU,
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA

JALAN KENANGA NOMOR 26 MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, DIY 55282
TELEPON (0274) 489390, FAKSIMILE (0274) 489390 EXT 111
LAMAMAN www.kkp.go.id/stasiunkipmyogyakarta SUREL bkipmjogja@kkp.go.id

10 Januari 2025

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.010/SKIPM.JOG/KP.440/I/2025

No	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Bersama ini kami sampaikan : Dokumen Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024	Satu Berkas	

Diterima tanggal.....Januari 2025
Penerima

.....

(.....)
Nomor Telpn

Yogyakarta , 10 Januari 2025
Plt Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



Maria Tresia Sundah
Maria Tresia Sundah

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (LKj Stasiun KIPM Yogyakarta) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj ini disusun dengan mengacu pada Target Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024 dan juga dengan memperhatikan Renstra 2020-2024, Renja 2024 serta Manual IKU 2024. Dalam setiap indikator terdapat penjelasan terkait definisi dan juga penjelasan untuk masing-masing capaiannya. Karena LKJ ini merupakan LKJ Tahun 2024 sehingga data capaian merupakan data triwulan I - IV pada tahun anggaran 2024

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga LKj Stasiun KIPM Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



Maria Tresia Sundah

Intisari Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2024 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan IV Tahun 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2024 adalah 114,70
- NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.
- Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan IV Tahun 2024 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan IV yang ditentukan.
- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp 4,385,737,488 atau sebesar 76,10% dari pagu Rp 4,836,855,000

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2023 BKIPM mengalami transformasi kelembagaan dimana fungsi karantina ikan beralih ke Badan Karantina Indonesia sesuai perpres no 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai Perpres 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

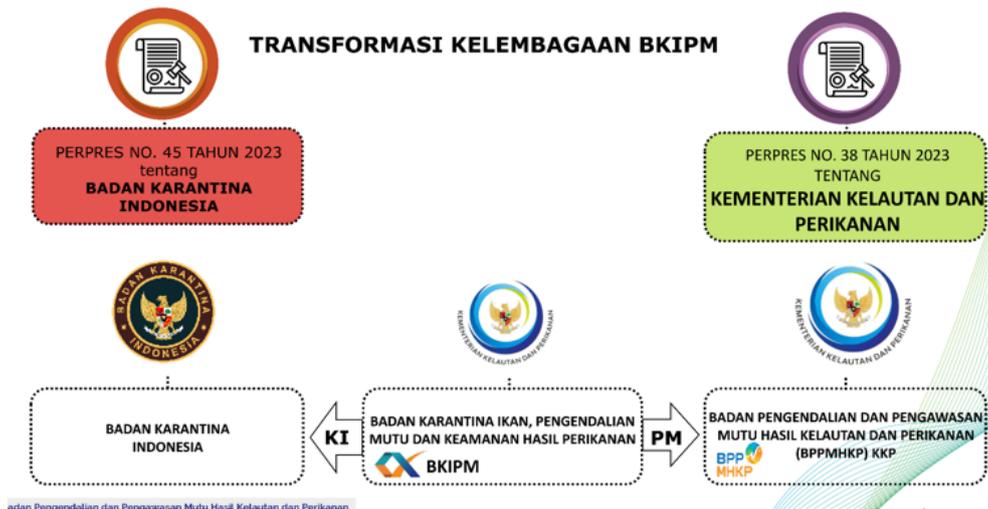
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas akuntabilitas dalam penerapan *good governance* menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta perlu melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan evaluasi kegiatan dan Tata Cara Reviu atas Laporan evaluasi kegiatan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja 2024

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta. Dalam laporan kinerja disampaikan keberhasilan dan kendala dalam pencapaian kegiatan yang telah ditargetkan.



Gambar 1. Transformasi Kelembagaan BKIPM

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode tersebut. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta pada Tahun 2024 dengan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja triwulan berikutnya.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

Laporan Kinerja 2024

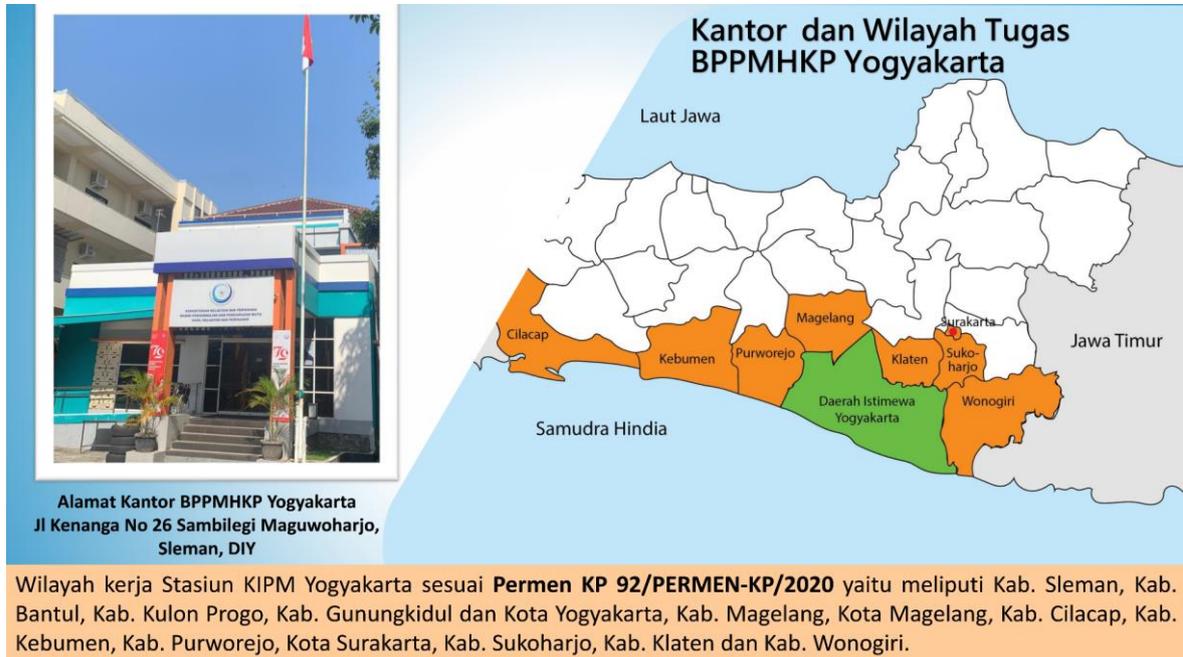
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi saat ini masih sesuai regulasi yang lama dikarenakan SOTK UPT belum terbit :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
5. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
6. Penindakan pelanggaran pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - a. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
 - c. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
 - d. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
 - e. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
 - f. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

Laporan Kinerja 2024

- g. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Kantor dan Wilayah Kerja BPPMHKP Yogyakarta

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta memiliki sumber daya manusia total sebanyak 32 orang dengan rincian 17 ASN, 5 PPNPN dan 10 Outsourcing. ASN di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 1 pejabat struktural, 11 pejabat fungsional tertentu dan 5 fungsional umum.

Tabel 1. Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut

Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta
Jabatan Fungsional Tertentu (11) - Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda (2) - Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama (1) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir (3) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia (1) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil (1) - Pranata Keuangan APBN Penyelia (1) - Pranata SDM Mahir (1) - Penata Laksana Barang Terampil (1)
Jabatan Fungsional Umum (5), Analis SDMA (1), Pengadministrasi Umum (1), Pengelola Data (1), Penyusun LK (1), Pengadministrasi Persuratan (1)
PPNPN (5) Pramubakti Lab (3), Pramubakti IT (1), Pramubakti Bagian Umum (1)
Outsourcing (10) Pengolah Data (1), Cleaning Service (2), Driver (1), Security (6)

Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Urusan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Laporan Kinerja 2024

Untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada, Kepala UPT memerlukan personel dibawahnya yang dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai dalam pembagian ketugasan yaitu oleh Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- II. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- IV. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Visi Stasiun KIPM Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selaku salah satu UPT dari BKIPM, Stasiun KIPM Yogyakarta harus mewujudkan visi dan misi yang telah dijabarkan di atas.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai UPT BKIPM turut bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,

Laporan Kinerja 2024

2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Stasiun KIPM Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun KIPM Yogyakarta (Gambar 2.1). Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan, berikut adalah sasaran kegiatan pada Stasiun KIPM Yogyakarta



Gambar 4.. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024

Sasaran kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2024 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap triwulannya. Indikator Kinerja Kegiatan telah

Laporan Kinerja 2024

ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pada triwulan IV Tahun 2024 yaitu bulan Oktober, terkait SOTK baru BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka UPT mengikuti perubahan beberapa indikator kinerja kegiatan yang mengakibatkan perubahan dokumen kinerja. Dibawah ini adalah perbandingan IKK awal dan IKK revisi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Awal Stasiun KIPM Yogyakarta

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	98
		2	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	6
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (UPI)	2
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Produk)	10
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Unit)	5
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	88.31
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Lokasi)	2
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perdikat wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	86
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	82
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	80
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	93.76
		14	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	82
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	80
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	80		

Perjanjian Kinerja Triwulan IV Stasiun KIPM Yogyakarta

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	99
SK. 2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
SK. 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai indeks)	
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai indeks)	86
		8.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (nilai)	82
		9.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	100
		10.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (nilai)	93,76
		11.	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (nilai)	71
		12.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	80
		13.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	80
		14.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	80

Laporan Kinerja 2024

Pencapaian Kinerja Organisasi dilihat dari Total Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%. NPSS diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menghitung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$\text{NPSS} = \frac{\sum \% \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU yg mempunyai target pada triwulan tersebut}}$$

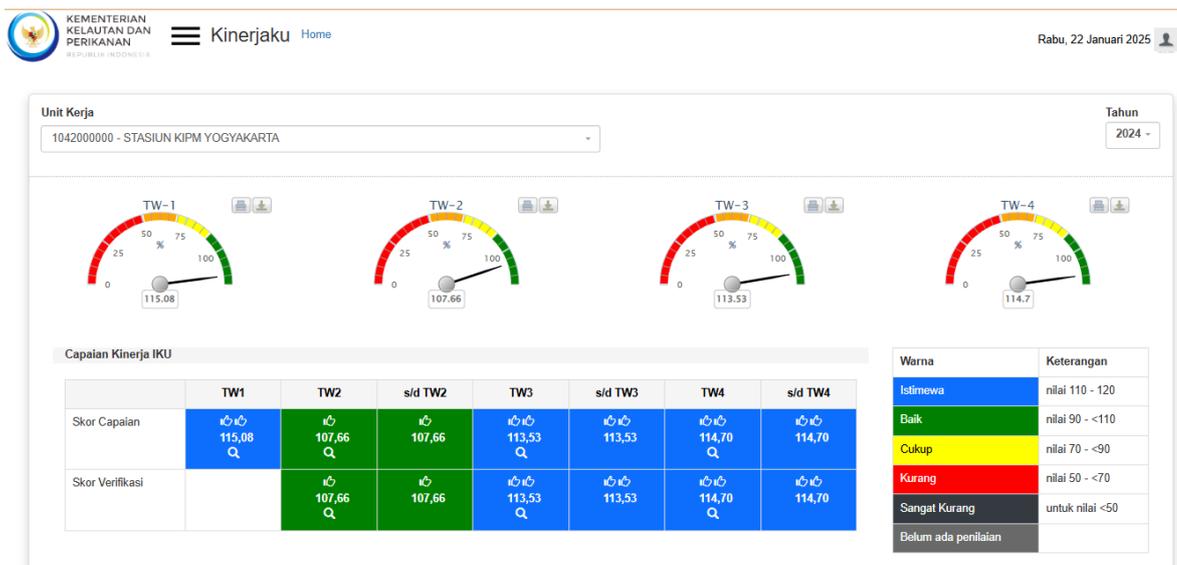
Adapun keterangan status NPSS pada aplikasi Kinerjaku adalah sebagai berikut:

SANGAT BAIK	$\geq 110 - 120 + \text{IDE BARU}$
BAIK	$\geq 90 - < 120$
CUKUP	$\geq 70 - < 90$
KURANG	$\geq 50 - < 70$
SANGAT KURANG	≤ 50
BELUM ADA PENILAIAN	
BELUM INPUT CAPAIAN	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.



Gambar 5. Hasil Pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 114,70 dalam kriteria istimewa. Untuk memperoleh kriteria baik, NPSS minimal adalah 90 - ≤ 110 dan kriteria istimewa nilai 110 – 120.

Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2024



NKO Desember - 2024 Download

Unit Kerja : STASIUN KIPM YOGYAKARTA

Skor Kinerja : **114.70**

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✘, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 🔄
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target Desember	Capaian Desember	%	Target s/d Desember	Capaian s/d Desember	%	Tgl Input
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan						115,25			115,25		
IKS 01.01	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Data Dukung3 ✓ Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	09-Jan-2025 15:31
IKS 01.02	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Data Dukung3 ✓ Data Dukung4 ✓ Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	86,36	120,00	70,00	86,36	120,00	09-Jan-2025 15:31
IKS 01.03	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	70,00	100,00	120,00	09-Jan-2025 15:31
IKS 01.04	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,00	99,00	100,00	101,01	99,00	100,00	101,01	09-Jan-2025 15:31
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar						118,71			118,71		
IKS 02.01	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	83,10	118,71	70,00	83,10	118,71	09-Jan-2025 15:31
SK 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta						110,15			110,15		
IKS 03.01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,36	3,36	3,89	115,77	3,36	3,89	115,77	09-Jan-2025 15:31
IKS 03.02	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	90,35	105,06	86,00	90,35	105,06	09-Jan-2025 15:31
IKS 03.03	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	82,00	83,05	101,28	82,00	83,05	101,28	09-Jan-2025 15:31
IKS 03.04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Akumulasi	71,00	71,00	92,50	120,00	71,00	92,50	120,00	09-Jan-2025 15:31
IKS 03.05	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	93,76	93,94	100,19	93,76	93,94	100,19	09-Jan-2025 15:31
IKS 03.06	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	09-Jan-2025 15:31
IKS 03.07	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00	09-Jan-2025 15:31
IKS 03.08	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	84,34	105,43	80,00	84,34	105,43	09-Jan-2025 15:31
IKS 03.09	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	97,50	120,00	80,00	97,50	120,00	09-Jan-2025 15:31

Tutup

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Triwulan IV			% terhadap Target 2024	% Renstra 2020-2024	
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan									
IK1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	100	120	120	IKU Baru	-
IK2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	86,36	120	120	IKU Baru	-
IK3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	100	120	120	6 lokasi	100
IK4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	99	99	100	101,1	101,1	99	101,1
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
IK5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	100	120	120	IKU Baru	-
SK 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta									
IK 6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta	Indeks	3,36	3,36	3,89	115,7	115,77	3,36	115,7
IK 7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Indeks	86	86	90,35	105,06	105,06	86	105,06
IK 8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Nilai	82	82	83,05	101,28	101,28	82	101,28
IK 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Nilai	71	71	92,50	120	120	71	120
IK 10	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Nilai	93,76	93,76	93,94	100,19	100,19	93,76	100,19
IK 11	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	%	100	100	100	100	100	100	100
IK 12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	%	80	80	100	120	120	80	120
IK 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	%	80	80	84,34	105,43	105,43	80	105,43

Laporan Kinerja 2024

IK 14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	%	80	80	97,50	120	120	80	120
--------------	---	---	----	----	-------	-----	-----	----	-----

3.2. Analisis dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut (dengan perhitungan nilai posisi akhir)

Sasaran kegiatan 1.

Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, salah satunya mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU.

Layanan Sertifikasi BPPMHKP

Layanan Sertifikasi BPPMHKP

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, salah satunya mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU, yang terbagi menjadi:

Sertifikasi Produk Perikanan Primer			Sertifikasi Produk Perikanan Pascapanen	
1 CBIB Cara Budidaya Ikan yang Baik Acuan: SNI 8228.1:2015	2 CPIB Cara Pembenihan Ikan yang Baik Acuan: SNI 8035:2019	3 CPIB Kapal Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal Acuan: SNI 8087:2014	7 SKP Sertifikat Kelayakan Pengolahan Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2007) Permen KP No. 17 Tahun 2019	8 HACCP Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2007)
4 CPPIB Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik Acuan: SNI masing-masing komoditas	5 CPOIB Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 187 tahun 2023	6 CDOIB Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 186 tahun 2023	9 SPDI Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan Acuan: PP 27 Tahun 2021, Permen KP 58 Tahun 2021 dan PP 57 tahun 2015	Fungsi Lain <ul style="list-style-type: none"> Monitoring Mutu Hasil Perikanan dan Residu Perairan Sertifikasi Penerbitan HC Mutu Ekspor dan Pengendalian Impor Pengelolaan Laboratorium Pengujian

IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya

Stasiun KIPM Yogyakarta

Laporan Kinerja 2024

meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Cara pengukuran untuk pencapaian IK

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkkn CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

Laporan Kinerja 2024

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta selama triwulan IV hanya ada realisasi untuk sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Atas Kapal. Untuk sertifikasi bidang primer lainnya setelah Oktober 2024 tidak ada permohonan. Sehingga capaian pada indikator 01 adalah sebagai berikut

- **CBIB : Cara Budidaya Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CPIB : Cara Pembenihan Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CPPIB : Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CPOIB : Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CDOIB : Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CPIB Kapal : Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal**
Target Sertifikat : 6
Realisasi Sertifikat : 6
Persentase Capaian : 100%



Gambar 6. Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$%X = \frac{0+0+0+0+0+100}{1} = 100\%$$

Indikator ini merupakan indikator baru pada triwulan IV tahun 2024, anggaran pada IK ini ialah Rp.89.810.000 dan terealisasi Rp. 87.645.603 atau 97,59%.

Laporan Kinerja 2024

Selain melakukan inspeksi CPIB Kapal, selama triwulan IV telah dilakukan kegiatan identifikasi pelaku usaha sektor primer ke Dinas terkait dan juga pelaku usaha.

Sertifikat Cara Penganan Ikan Yang Baik diatas Kapal adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan ikan



Gambar 7. Kegiatan Identifikasi Pelaku Usaha Primer

Tabel 4. Jumlah Sertifikat Sektor Produksi Primer Triwulan IV (10 Oktober – 31 Desember 2024) Tahun 2024

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta

BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT SEKTOR PRODUKSI PRIMER																		(%) Primer
	CPIB Kapal			CPIB Pembenuhan			CBIB Budidaya			CPPIB			CPOIB			CDOIB			
	Permo honan	Terbit	(%)	Perm ohon an	Terbit	%	Perm ohon an	Terbi t	%	Perm oho	Terbit	%	Perm ohon an	Ter bit	%	Perm ohon an	Ter bit	%	
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	6	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
TOTAL	6	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

Tabel 5. .Rekapitulasi CPIB Kapal Tahun 2024 (10 Oktober – 31 Desember 2024)

Rekapitulasi Pelaksanaan CPIB di atas Kapal

Nama UPT KIPM : Stasiun KIPM Yogyakarta
Tahun : 2024

No	Nama Kapal	Pemilik Kapal	Alamat	GT	NIB	Tgl Permohonan	Status Permohonan	Jenis Kapal	Tgl Inspeksi	Hasil Inspeksi			Nomor Sertifikat	Grade	Jenis Produk	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
										Kritis	Mayor	Minor					
1	Colombia 16	Lili Nur Indah Sari	Jl. Budi Utomo RT 006/RW 009, Ska	29	9120201632813	10 November 2024	Perparjangan	Penangkap ikan	10 November 2024	0	2	5	ID-CPIB-K-33-240011	C	Frozen Fish, Frozen Tuna, Frozen Cephalopod	02 December 2024	02 December 2025
2	Mahkota Mina Makmur	H. Iragi Lutfi	Teleng, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan,	67	9120305451854	25 November 2024	Baru	Penangkap ikan	26 November 2024	0	2	6	ID-CPIB-K-35-240012	C	Frozen Fish, Frozen Skipjack Tuna, Frozen Cephalopod	02 December 2024	02 December 2025
3	Pulau Dewata	PT. Hasil Melimpah Jaya	Jl. Kayak Komp Pelabuhan PPNC, C	26	2305230076165	1 Desember 2024	Baru	Penangkap ikan	2 Desember 2024	0	2	5	ID-CPIB-K-33-240024	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	17 December 2024	17 December 2025
4	Berkat Melimpah 15	Sri Hartati	Jl. Delima No 223, Kel. Tambakreja,	17	6120004562912	1 Desember 2024	Baru	Penangkap ikan	2 Desember 2024	0	2	4	ID-CPIB-K-33-240023	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	17 December 2024	17 December 2025
5	Hasil Melimpah 2	Winson Cahyadi	Jl. Delima No 223, Kel. Tambakreja,	30	1233001301705	6 Desember 2024	Baru	Penangkap ikan	7 Desember 2024	0	2	6	ID-CPIB-K-33-240025	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	17 December 2024	17 December 2025
6	Hasil Melimpah Jaya 2	Winson Cahyadi	Jl. Delima No 223, Kel. Tambakreja,	10	1233001301705	25 Desember 2024	Baru	Penangkap ikan	26 Desember 2024	0	2	6	ID-CPIB-K-34-240086	C	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	31 December 2024	31 December 2025

IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Cara Pengukuran IK 02 ini adalah

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Laporan Kinerja 2024

- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta selama tahun 2024 terdapat realisasi untuk sertifikasi HACPP dan SKP. Sehingga capaian pada indikator 01 adalah sebagai berikut :

- **HACCP**

Permohonan Sertifikat : 13

Realisasi Sertifikat : 13

Persentase Capaian : 100

- **SKP**

Permohonan Sertifikat : 22

Realisasi Sertifikat : 16

Persentase Capaian : 72,73

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = \frac{100+72,30}{2} = 86,36\%$$

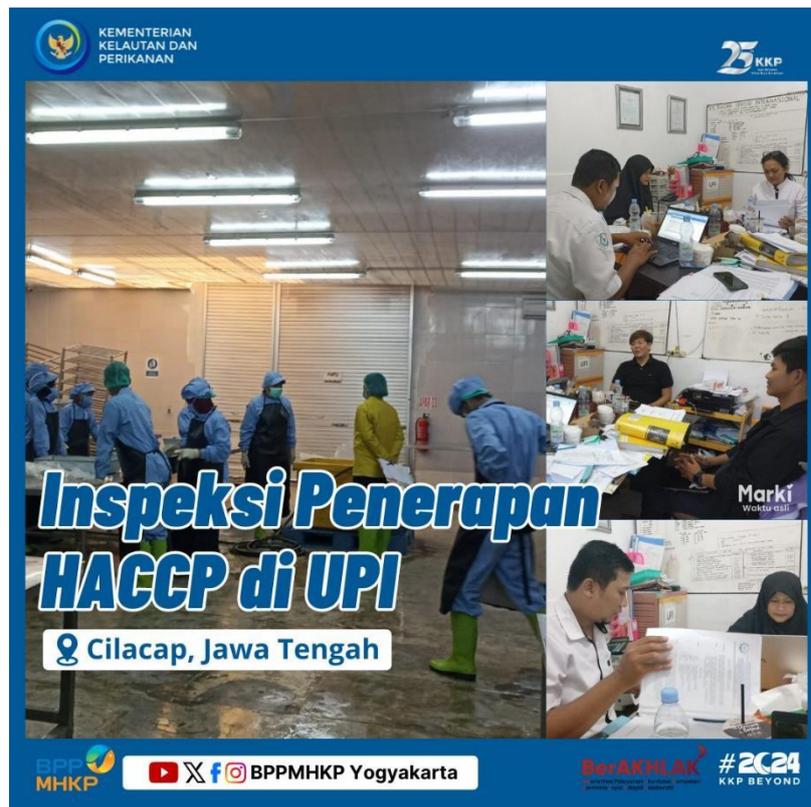
Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Beberapa UPI tidak terbit SKP dikarenakan tidak melakukan tindakan perbaikan kembali atas catatan yang diberikan verifikator.

Tabel 6 . Realisasi SKP Tahun 2024 (> 10 Oktober 2024)

Realisasi SKP Tahun 2024

NAMA UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta

No	NAMA UPI	ALAMAT	TANGGAL TERBIT	TANGGAL KADALUARSA	NAMA PRODUK	No SKP
	> 10 OKTOBER					
1	CHANNA SENTOSA	Kabupaten Gunung Kidul	10/10/2024	10/10/2026	Abon Ikan	33908/34/SKP/LN/X/2024
2	MENTARI MULYO	Kabupaten Bantul	11/10/2024	11/10/2026	Lele Asap	34021/34/SKP/AS/X/2024
3	BAROKAH ZAIN	Kabupaten Cilacap	23/10/2024	23/10/2026	Sambal Ikan	34076/33/SKP/LN/X/2024
4	BERKAH BANDENG	Kabupaten Cilacap	23/10/2024	23/10/2026	Bandeng Presto	34078/33/SKP/LN/X/2024
5	MINA ABADI	Kabupaten Cilacap	31/10/2024	31/10/2026	Bakso Ikan	34142/33/SKP/SR/X/2024
6	MINA ABADI	Kabupaten Cilacap	31/10/2024	31/10/2026	Otak-Otak Ikan	34143/33/SKP/LN/X/2024
7	Laguna Indah	Kabupaten Kulonprogo			Keripik Bakso Goreng Ikan	Tidak Terbit SKP
8	Laguna Indah	Kabupaten Kulonprogo			Krispi Ikan	Tidak Terbit SKP
9	Laguna Indah	Kabupaten Kulonprogo			Peyek Ikan	Tidak Terbit SKP
10	Tefa Salmon	Kabupaten Kulonprogo			Ekado	Tidak Terbit SKP
11	POKLAHSAR AL-FATAH	Kabupaten Wonogiri			Keripik Bakso Goreng Ikan	Tidak Terbit SKP
12	POKLAHSAR AL-FATAH	Kabupaten Wonogiri			Bakso Ikan	Tidak Terbit SKP
	NOVEMBER					
1	ANAK BAHARI	Kabupaten Bantul	06/11/2024	06/11/2026	Bakso Ikan	34255/34/SKP/SR/XI/2024
2	MINI PLANT PT MAKAN UDANGNYA INDONESIA	Kabupaten Bantul	28/11/2024	28/11/2026	Udang Beku	34594/34/SKP/BK/XI/2024
3	KARYA MINA	Kabupaten Cilacap	12/11/2024	12/11/2026	Abon Ikan	34332/33/SKP/LN/XI/2024
	DESEMBER					
1	MINA MULYA MAJU MANDIRI	Kabupaten Gunung Kidul	02/12/2024	02/12/2026	Lele Bumbu Kuning	34615/34/SKP/LN/XII/2024
2	SAKURA FISH	Kabupaten Bantul	12/12/2024	12/12/2026	Ikan Air Tawar Bumbu Kuning	34762/34/SKP/LN/XII/2024
3	ASHLAN FOOD	Kabupaten Bantul	12/12/2024	12/12/2026	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku	34761/34/SKP/BK/XII/2024
4	DAPUR MAMA APRI	Kabupaten Sukoharjo	13/12/2024	13/12/2026	Pempek Ikan	34793/33/SKP/LN/XII/2024
5	ALMIRAKENCANA	Kabupaten Cilacap	24/12/2024	24/12/2026	Abon Ikan	34990/33/SKP/LN/XII/2024
6	PUTRA PAPUA	Kabupaten Klaten	31/12/2024	31/12/2026	Nila Beku	35115/33/SKP/BK/XII/2024
7	CIPTA MINA BOGA	Kabupaten Magelang	31/12/2024	31/12/2026	Abon Lele	35114/33/SKP/KR/XII/2024



Gambar 8. Kegiatan Sertifikasi HACCP di UPI

Laporan Kinerja 2024

No	Nama	Alamat	Provinsi	UPT	Produk	Grade		No.Sertifikat HACCP	Tgl.Terbit	Berlaku Sampai	Keterangan
1	HASIL MELIMPAH, PT	Jl. Kayak - Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Demersal Fish	B	1	003/PM/HACCP/PB/05/24	02 Mei 2024	02 Mei 2026	INSPEKSI HACCP 23 APRIL 2024
2	TOXINDO PRIMA, PT	Jl. Lingkar Timur No.5 Tegal Kamulyan, Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cooked Lobster	B	2	119/PM/HACCP/PB/07/23	21 Juli 2023	21 Juli 2025	MONEV HACCP 24 JULI 2024
					Frozen Cooked Shellfish	B	3	112/PM/HACCP/PB/07/23	21 Juli 2023	21 Juli 2025	MONEV HACCP 24 JULI 2024
					Frozen Demersal Fish	B	4	113/PM/HACCP/PB/07/23	21 Juli 2023	21 Juli 2025	MONEV HACCP 24 JULI 2024
					Frozen Lobster	B	5	120/PM/HACCP/PB/07/23	21 Juli 2023	21 Juli 2025	MONEV HACCP 24 JULI 2024
					Frozen Shrimp	B	6	114/PM/HACCP/PB/07/23	21 Juli 2023	21 Juli 2025	MONEV HACCP 24 JULI 2024
3	KARYA PRODUKSI KAMTO, CV	Jl. Dayakan No.29 A, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Special Region of Yogyakarta - Indonesia	Yogyakarta	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Pempek	B	7	202/PM/HACCP/PB/08/23	18-Aug-23	18-Aug-23	Monev HACCP 17 Oktober 2024
4	BERKAH MUTIARA SELATAN, PT	Jl. Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Central Java	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Hairtail Fish	B	8	023/PM/HACCP/PB/10/23	5-Oct-23	5-Oct-25	Monev HACCP 22 Oktober 2024
					Salted Jellyfish	B	9	024/PM/HACCP/PK/10/23	5-Oct-23	5-Oct-25	Monev HACCP 22 Oktober 2024
5	PT. Tarzan Seafood Internasional	Kawasan PPSC Jl. Lingkar Timur, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Demersal Fish	B	10	048/PM/HACCP/PB/10/24	7 Oktober 2024	7 Oktober 2026	Inspeksi Perpanjangan 1 Oktober 2024

Laporan Kinerja 2024

		Central Java - Indonesia									
6	BERKAH MUTIARA SELATAN, PT	Jl. Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Central Java	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Chepalods	B	11	071/PM/HACCP/PB/11/24	20-Nov-24	20-Nov-26	Inspeksi Baru 14 November 2025
					Frozen Demersal Fish	B	12	072/PM/HACCP/PB/11/24	20-Nov-24	20-Nov-26	Inspeksi Baru 14 November 2025
					Frozen Pelagic Fish	B	13	073/PM/HACCP/PB/11/24	20-Nov-24	20-Nov-26	Inspeksi Baru 14 November 2025

Gambar 7. Data realisasi Sertifikat HACCP 2024

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Untuk realisasi pelaksanaan HACCP terdiri dari terbitnya sertifikat baru sebanyak 3 produk, inspeksi perpanjangan sebanyak 2 produk, dan monitoring evaluasi 8 produk, sehingga total 13 realisasi sertifikat HACCP realisasi 100%.

IK3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.



Gambar 9. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik

Laporan Kinerja 2024

Stasiun KIPM Yogyakarta melakukan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada pasar-pasar tradisional, pasar modern, Pelabuhan perikanan dan supplier. Untuk tahun 2024 target ada 6 lokasi yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dari target enam Lokasi terealisasi 6 lokasi sehingga tercapai 100%. Terdapat perubahan target dari Indikator ini menjadi target 70%. Pengukuran indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

- %X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI
- A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI
- B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI
- **Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik**
Target Pengawasan : 6 lokasi
Realisasi Pengawasan : 6 lokasi
Persentase Capaian : 100 %

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = \frac{6}{6} = 100\%$$

Realisasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik 2024

No	Kabupaten (LOKASI)	Titik Pengambilan Sampel (LOKUS)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem I)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem II)
1	Gunungkidul	Pasar Playen	27 Februari 2024	3 September 2024
		Pasar Argosari		
		PPP Sadeng	5 Maret 2024	10 September 2024
2	Bantul	PIH Depok	7 Maret 2024	26 September 2024
		Pasar Niten		
		Pasar Bantul	27 Maret 2024	25 September 2024
3	Sleman	Pasar Gentan	29 Februari 2024	5 September 2024
		Lottemart		
		Pasar Condong Catur	21 Maret 2024	12 September 2024
Indogrosir				
4	Kulonprogo	Pasar Pripih	24 April 2024	16 Oktober 2024
		Pasar Bendungan		

Laporan Kinerja 2024

5	Kota Yogyakarta	Pasar Kranggan	22 Maret 2024	24 Oktober 2024
		Superindo JI Parangtritis	19 April 2024	3 Oktober 2024
		Pasar Prawirotaman	23 April 2024	3 Oktober 2024
		Pasar Sentul		4 Oktober 2024
		Pasar Beringharjo	30 April 2024	10 Oktober 2024
		Toko Progo		4 Oktober 2024
6	Kebumen	Supplier Nasruddin	25 April 2024	8 Oktober 2024
		Supplier Ambar Pujiono		

IK 4.Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Cara pengukuran indikator ini ialah :

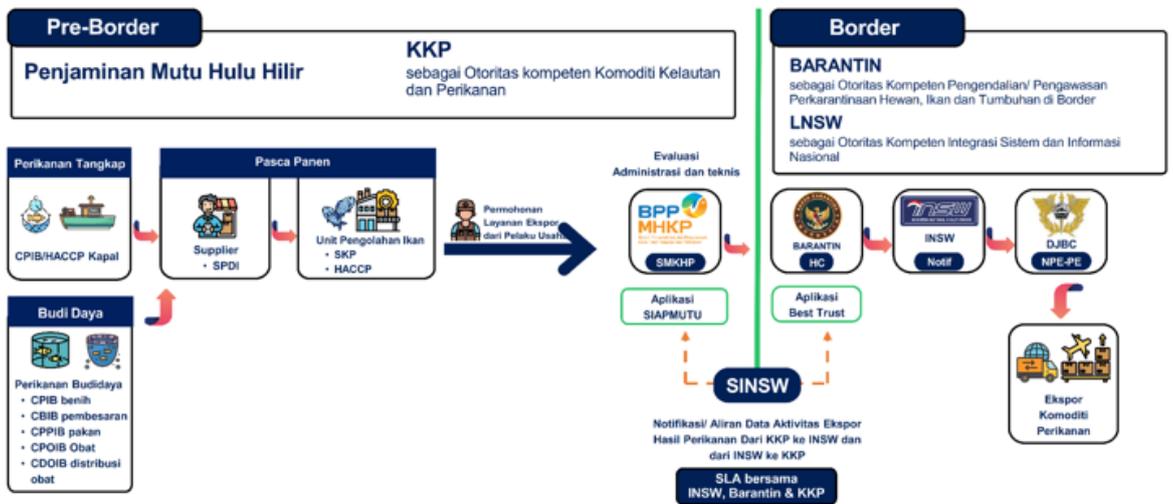
$$x = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Proses Bisnis Kegiatan Ekspor Hasil Kelautan Perikanan



Gambar 10. Proses Bisnis Kegiatan Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan

Kontribusi BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan dibuktikan dengan diterimanya atau tidaknya penolakan sertifikat mutu ikan (HC mutu) UPT Stasiun KIPM Yogyakarta di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah sertifikat yang diterbitkan dengan sertifikat yang memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (produk diterima) dikalikan 100%, seperti yang tertera pada tabel berikut

Laporan Kinerja 2024

Tabel 7 : Jumlah Sertifikasi Ekspor 2024

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta

BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT EKSPOR						Jumlah PENOLAKAN	% Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan
	KI-D1	Mutu E (Jepang)	Mutu F (Amerika Serikat)	Mutu G (Taiwan)	Mutu B (China)	Mutu D (Vietnam)		
Januari	0	2	0	0	1	0	0	100
Februari	0	2	0	0	1	0	0	100
Maret	0	3	0	0	0	0	0	100
April	0	2	0	0	0	0	0	100
Mei	0	3	0	0	4	0	0	100
Juni	0	3	0	0	7	0	0	100
Juli	0	3	0	0	9	0	0	100
Agustus	0	3	0	0	10	0	0	100
September	0	3	0	0	12	0	0	100
Oktober	0	5	0	0	11	0	0	100
November	0	5	0	0	6	0	0	100
Desember	0	4	0	0	6	1	0	100
TOTAL	0	38	0	0	67	1	0	100

Laporan Kinerja 2024

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024, sertifikat ekspor baik KI-D1 maupun sertifikat ekspor mutu yang memenuhi syarat sejumlah 106 sertifikat tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian rasio ekspor ikan yang diterima di negara tujuan pada Triwulan ini mencapai 100% dari target 98% sehingga secara persentase tercapai 102,04%, sehingga capaian IK ini ialah 100%

Sehingga secara total realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%x = \frac{106 - 0}{106} = 100\%$$

Negara tujuan ekspor utama melalui Stasiun KIPM Yogyakarta adalah Jepang dengan komoditas udang diikuti dengan negara China dengan komoditas layur beku Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan Stasiun KIPM Yogyakarta, melalui surveilan konsistensi penerapan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian virus, kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu dan inspektur karantina yang ada di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.

Sasaran kegiatan 2.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

IK5 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Laporan Kinerja 2024

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri



Gambar 11. Pengujian di Laboratorium KIPM Yogyakarta

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi: 1. Ruang Lingkup; 2. Acuan Normatif, 3. Persyaratan Umum; 4. Persyaratan Struktural, 5. Persyaratan Sumber Daya; 6. Persyaratan Proses; 7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi: 1. Persyaratan Umum; 2. Persyaratan Struktural; 3. Persyaratan Sumberdaya; 4. Persyaratan Proses; 5. Persyaratan Sistem Manajemen

Laporan Kinerja 2024

Cara pengukuran indikator ini ialah :

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

Capaian Indikator IK 05 ini adalah

A : 81,35%

B : 84,85 %

$$\%X = \frac{81,35+84,85}{2} \times 100\% = 83,10 \%$$

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP dihasilkan sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 81,35 didapatkan dari 13 laboratorium
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 84,85 didapatkan dari 14 lembaga inspeksi
3. Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar 83,10

Indikator ini baru di tahun 2024 dan realisasi triwulan IV sebesar 83,10 % dari target 70 % sehingga capaian 118,71 %

Laboratorium Stasiun KIPM Yogyakarta dengan nomor akreditasi LP-650-IDN terakreditasi dengan 6 ruang lingkup pengujian yaitu : Angka Lempeng Total, Escherechia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Formalin dan Sensori.

Tabel 8. Jumlah pengujian laboratorium Stasiun KIPM Yogyakarta tahun 2024

PARAMETER	ORGANOLEPTIK	KIMIA	MIKROBIOLOGI	TOTAL PENGUJIAN
JUMLAH PENGUJIAN	324 *107 uji organoleptik lapangan	206	903	1.433

Laporan Kinerja 2024

Sampel berasal dari berbagai kegiatan yaitu Monitoring Kesegaran, Surveilen Mutu, Pengujian Mandiri dan Organoleptik Lapangan.

Sementara untuk Lembaga Inspeksi Stasiun KIPM Yogyakarta dengan ruang lingkup Surveilen HACCP. Pelaksanaan Surveilen HACCP tahun 2024 dilakukan terhadap UPI yang telah memiliki sertifikat HACCP dengan frekuensi sesuai grade UPI. Adapun pelaksanaan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. UPI YANG MEMENUHI PERSYARATAN EKSPOR LINGKUP STASIUN KIPM YOGYAKARTA TAHUN 2024

No	Nama	Alamat	Provinsi	UPT	Pelaksanaan Surveilen HACCP
1	PT. Berkah Mutiara Selatan	Jl. Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	30 Januari 2024
					14 Mei 2024
					18-Sep-24
2	ASIH PUTRI MANDIRI, PT	Jalan Lingkar Selatan, Komplek Kawasan Industri Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java -	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	22 Februari 2024
					28 Mei 2024
3	Hasil Melimpah Cilacap, PT	Jl. Kayak-Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kel Tegal Kamulyan, Kec Cilacap Selatan, Kab Cilacap, Jawa Tengah	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	27 Februari 2024
					26 Juni 2024
					29 Okt 2024
4	PT TARZAN SEAFOOD INTERNASIONAL	Kawasan PPSC Jl. Lingkar Timur, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	21 Maret 2024
					26 Juni 2024
					14-Nov-24
5	TOXINDO PRIMA, PT	Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	21 Maret 2024
					24 Juli 2024

Laporan Kinerja 2024

					28 Nov 2024
6	KARYA PRODUKSI KAMTO, CV	Jl. Dayakan No.29 A, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Special Region of Yogyakarta - Indonesia	DI Yogyakarta	Stasiun KIPM Yogyakarta	1 April 2024
					30 Juli 2024
11-Nov-24					

SK3. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

IK6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Yogyakarta

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Cara Pengukuran IK ini adalah

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**

Laporan Kinerja 2024

Survei Kepuasan Pelanggan / Pengguna Jasa terhadap pelayanan oleh Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan IV Tahun 2024 : 97,44 atau dengan nilai indeks 3,89 . Tingkat Kepuasan Masyarakat / Pengguna Jasa adalah " A " atau SANGAT BAIK. Realisasi tercapai melebihi target indeks triwulan IV yaitu 3,36. Sehingga capaian IK06 ini ialah $3,89/3,36 \times 100\%$ yaitu 115,77



Gambar 12. Nilai SKM Triwulan IV Stasiun KIPM Yogyakarta

IK7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

Laporan Kinerja 2024

- a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir
4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku kerja.
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
		IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
STASIUN KIPM YOGYAKARTA	17	21.24	84.96 %	39.12	97.8 %	25	83.33 %	5	100 %	90.35	TINGGI

Gambar 13. Nilai IP ASN 2024 Stasiun KIPM Yogyakarta

Indikator indeks profesionalitas ASN BKIPM dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Berdasarkan hasil penilaian Biro SDMA, Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2024 memperoleh nilai IP ASN sebesar 90,35 (termasuk dalam kategori tinggi). Dari target sebesar 86 tercapai nilai 90,35 atau sebesar 105,06% dari target yang sudah ditentukan.

IK8. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

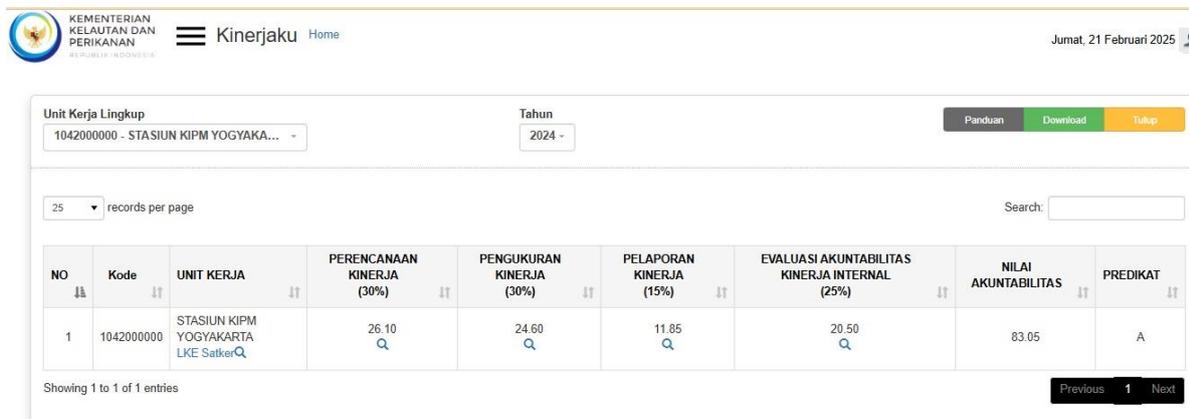
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN : Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP atau oleh unit UPT BPPMHKP. Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkup UPT dihitung dengan penilaian atas kinerja organisasi berdasarkan LKE bagian program Sekretariat BPPMHKP. Penilaian Mandiri SAKIP adalah kegiatan/proses mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerjaku dengan hasil/lampiran yang tersedia. Kegiatan pencocokan ini dilakukan secara mandiri

Laporan Kinerja 2024

dengan mengisi form yang telah disediakan Sekretariat BPPMHKP. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil SAKIP satker Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 83,05 dari target 82 atau mencapai 101,28 %.



The screenshot shows a web interface for the KIPM Yogyakarta performance report. At the top, there is a header with the logo of the Ministry of Marine and Fisheries and the text 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA'. Below the header, there is a navigation bar with 'Kinerjaku Home' and a date 'Jumat, 21 Februari 2025'. The main content area displays a table with the following data:

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1042000000	STASIUN KIPM YOGYAKARTA LKE Satker	26.10	24.60	11.85	20.50	83.05	A

Gambar 14. Nilai LKE 2024 Stasiun KIPM Yogyakarta

IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Laporan Kinerja 2024

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

CIKSS	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
RIKSS _i	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
TIKSS _i	: Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
n	: Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

NEf Satker	: Nilai Efektivitas Satker
RVRO _i	: Realisasi Volume RO i
TVRO _i	: Target Volume RO i
n	: Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times W_{NEf_{satker}}) + (NE_{satker} \times W_{NE_{satker}})$$

Keterangan:

NKA UEI	: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
CIKP	: Capaian Indikator Kinerja Program
NEf _{satker}	: Nilai Efektivitas Satker
NE _{satker}	: Nilai Efisiensi Satker
W _{CIKP}	: Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
W _{NEf_{satker}}	: Bobot Nilai Efektivitas Satker

Untuk data dukung Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di ambil dari Aplikasi SMART-DJA pada **Menu – Monitoring – NK Perencanaan**. NK Perencanaan untuk Stasiun KIPM Yogyakarta ialah 92,50.

Laporan Kinerja 2024

The screenshot shows the 'NK Perencanaan Satuan Kerja' interface. It includes a search bar, a 'Download Excel' button, and a table with the following data:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	92,50	100,00	100,00	50,00

Gambar 15. Nilai NK Perencanaan Stasiun KIPM Yogyakarta

IK10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Nilai IKPA diperoleh dari data input dan output setiap satuan kerja dengan menggunakan aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini agar Satker sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap). Satker agar dapat

Laporan Kinerja 2024

mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, agar seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi segera melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan. Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelola.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut

Laporan Kinerja 2024

Rencana aksi yang dilakukan agar meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT.

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai > Rp 200.000.000,- (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/ konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak > Rp 200.000.000,-).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

7. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%). Pagu anggaran pembagi dihitung sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini:

- Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, sehingga pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

Laporan Kinerja 2024

Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini :

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.
- Melakukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar). Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, agar adalah meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Upaya untuk meningkatkan capaian nilai IKPA, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya baik di level Satker dan level Unit Kerja Eselon I terhadap capaian nilai IKPA masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Ke depan, diharapkan nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2024 dapat lebih baik lagi dari nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2023. Capaian nilai IKPA dioptimalkan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2021 tentang Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga; dan berkoordinasi apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran belanja Tahun 2023.

Berdasarkan data perhitungan dari aplikasi OM SPAN diperoleh Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 93,94. Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta tahun 2024 adalah 93,94 melebihi target yang ditetapkan yaitu 93,76 sehingga dalam persen capainnya yaitu 100,19%.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
1	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	75.62	94.38	100.00	100.00	87.20	100.00	93.94	100%	0.00	93.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.34	18.88	10.00	10.00	8.72	25.00				
					Nilai Aspek	87.81		95.40			100.00					

Gambar 15.. Hasil Penilaian IKPA Tahun 2024 pada aplikasi OM SPAN

IK11. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

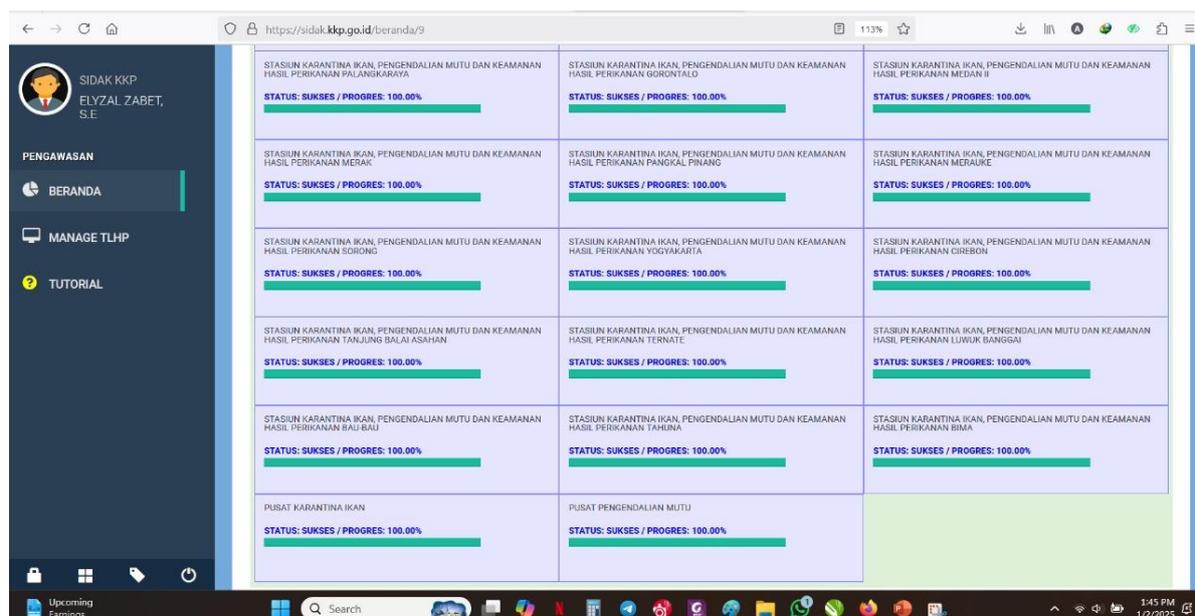
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” sebesar 100%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Adapun rincian capaian dari BPPMHKP adalah realisasi 100% atau tidak ada temuan dari BPK. Berarti capaian realisasi sebesar 100%

IK12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP melalui aplikasi SIDAK

Laporan Kinerja 2024



Gambar 16. Tangkapan Layar SIDAK 2024

IK13. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar 84,34% dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah melebihi target pada PK BPPMHKP Tahun 2024, yaitu target 80%.

Tabel 10. Hasil penilaian Kepatuhan PBJ BPPMHKP 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10,00
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15,00
Hasil Penilaian		100	84,34

IK14. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2023 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara umum mencapai dari target 80,00 %. Untuk BPPMHKP Yogyakarta sebagai berikut capaiannya

Tabel 10. Hasil penilaian Kepatuhan PBJ BPPMHKP 2024

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Pusat Manajemen Mutu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
2	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	80,00 %	97,50 %	Tercapai
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	80,00 %	97,50 %	Tercapai
4	Balai KIPM Jakarta II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
5	Balai Uji Standar KIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
6	Sekretariat BKIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Bandung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
8	Stasiun KIPM Cirebon	80,00 %	97,50 %	Tercapai
9	Balai KIPM Semarang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Yogyakarta	80,00 %	97,50 %	Tercapai

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembagadiminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun KIPM Yogyakarta juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisisensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Alokasi anggaran perubahan Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah Rp 5.045.705.000. Selanjutnya ada revisi sehingga pagu menjadi Rp 4.836.855.000 dan direvisi kembali menjadi Rp. 4.812.523.000

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp 4.765.144.546 atau sebesar 99,02%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta sd Triwulan IV Tahun 2024

NO	Kode Nama Kegiatan	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4,413,887,000	4,385,737,488	99,36	28,149,512
2	3989 Pengendalian Mutu	303,712,000	298,285,111	98,21	5,426,889
3	7010 Manajemen Mutu	94,924,000	81,121,947	85,46	13,802,053
TOTAL		4,812,523,000	4,765,144,546	99,02	47,378,454

3.3.2 Penjelasan atas realisasi anggaran

Matrix Pendanaan di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM, Pengendalian Mutu dan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan. Tiap-tiap kegiatan didukung anggaran yang digunakan untuk mencapai output yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
 - a. Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan

Laporan Kinerja 2024

- b. Operasional Kantor dan Pemeliharaan
- c. Layanan Sarana Internal
- d. Layanan Manajemen SDM
- e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- g. Layanan Manajemen Keuangan
- h. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

2. Pengendalian Mutu

- a. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan
- b. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
- c. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
- d. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
- e. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

4. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

- a. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
- b. Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan
- c. Unit kerja yang menerapkan standar sistem

3.3.3. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Laporan Kinerja 2024

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 50 orang ASN baik teknis maupun administrasi	Jumlah SDM setelah adanya reorganisasi saat ini sebanyak 17 orang ASN dibantu 5 PPNPN	Masih dibutuhkan banyak SDM untuk menjalankan organisasi yang baru dengan tupoksi yang baru	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar
Kondisi anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pada organisasi yang baru dan ketugasan yang baru	Saat ini SOTK UPT BPPMHKP belum disahkan sehingga anggaran belum dapat digunakan pada kegiatan tertentu	Masih membutuhkan kepastian sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran organisasi	Mendorong disahkannya SOTK yang baru agar anggaran dapat dicukupi dan segera dapat digunakan
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Beberapa aset dilimpahkan kepada BKHIT	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar menjangkau semua kegiatan	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional dan tanah

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2024 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan IV Tahun 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2024 adalah 114,70
- NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.
- Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan IV Tahun 2024 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan IV yang ditentukan.
- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp 4,385,737,488 atau sebesar 76,10% dari pagu Rp 4,836,855,000

4.2. Rekomendasi

- Melakukan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta secara rutin (bulanan dan triwulanan) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja pada periode anggaran berikutnya
- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia, selagi menunggu proses SOTK
- Menyiapkan ketugasan baru BPPMHKP sebagai otoritas kompeten SJMKHP dan 9 Sertifikasi
- Beberapa kegiatan dan belanja pegawai ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk rencana 1 tahun, perlu dilakukan revisi anggaran
- Meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan offline maupun online
- Tetap melakukan pemeliharaan status akreditasi dan status WBK yang telah dimiliki

